

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. R. A. Kartini Telepon (0914) 21180 Masohi Fax (0914) 21180 Kode Pos 97511

KATA PENGANTAR

Sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten maluku tengah tahun 2025.

Untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan, maka perlu dilakukan pengukuran atas realisasi capaian dibandingkan dengan target ditetapkan apabila terdapat perbedaan (performance gap) yang secara signifikan kurang atau melebihi dari target yang ditetapkan maka perlu diberikan penjelasan secukupnya sebagai umpan balik dalam perencanaan berikutnya. Upaya pencapaian kinerja di tahun 2025 merupakan lanjutan dan perbaikan dari hambatan yang di hadapi tahun 2024 maupun upaya mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai.

Penyusunan laporan kinerja menunjukkan komitmen yang kuat dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati, tidak hanya pada institusi Pemerintahan yang baik dan bersih di kabupaten Maluku Tengah.

Ucapan terima Kasih, Kami sampaikan yerimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya penyusunan Laporan kinerja Instansi pemerintah Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku tengah tahun 2025 ini.

Masohi, Februari 2026
Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Maluku Tengah



ABDUL LATIEF KEY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680916 198903 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Kedudukan, tugas pokok dan Fungsi
1.3 Isu Strategis
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
2.2 Indikator Kinerja Utama
2.3 Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja tahun 2025
3.2 Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2025 dengan capaian tahunsebelumnya
3.3 Perbandingan capaian kinerja dengan kinerja akhir Renstra
3.4 Perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja instansi Lainnya
3.5 Analisis penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atauPeningkatan/ Penuruna KinerjaSerta alternatif solusi yang telah dilakukan
3.6 Realisasi anggran
3.7 Efisiensi anggran
BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk memertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah dilaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Terdiri dari bagian komponen yang merupakan satuan kesatuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, merupakan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan aparatur organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta menggambarkan mengenai kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan, dalam pengambilan keputusan yang dikerjakan mengacu pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu Lembaga Tekhnis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah mempunyai struktur dan susunan Organisasi sebagai berikut :

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah

2. Fungsi

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang Pengendalian Kuantitas, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- g. Pelaksanaan pelayanan KB;

- h. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

a. Unsur Pimpinan

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasipelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengantugas dan fungsinya.

b. Unsur Pembantu

Sekretariat membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Tata Usaha
- Sub Bagian Keuangan dan Sarana

c. Unsur Pelaksana

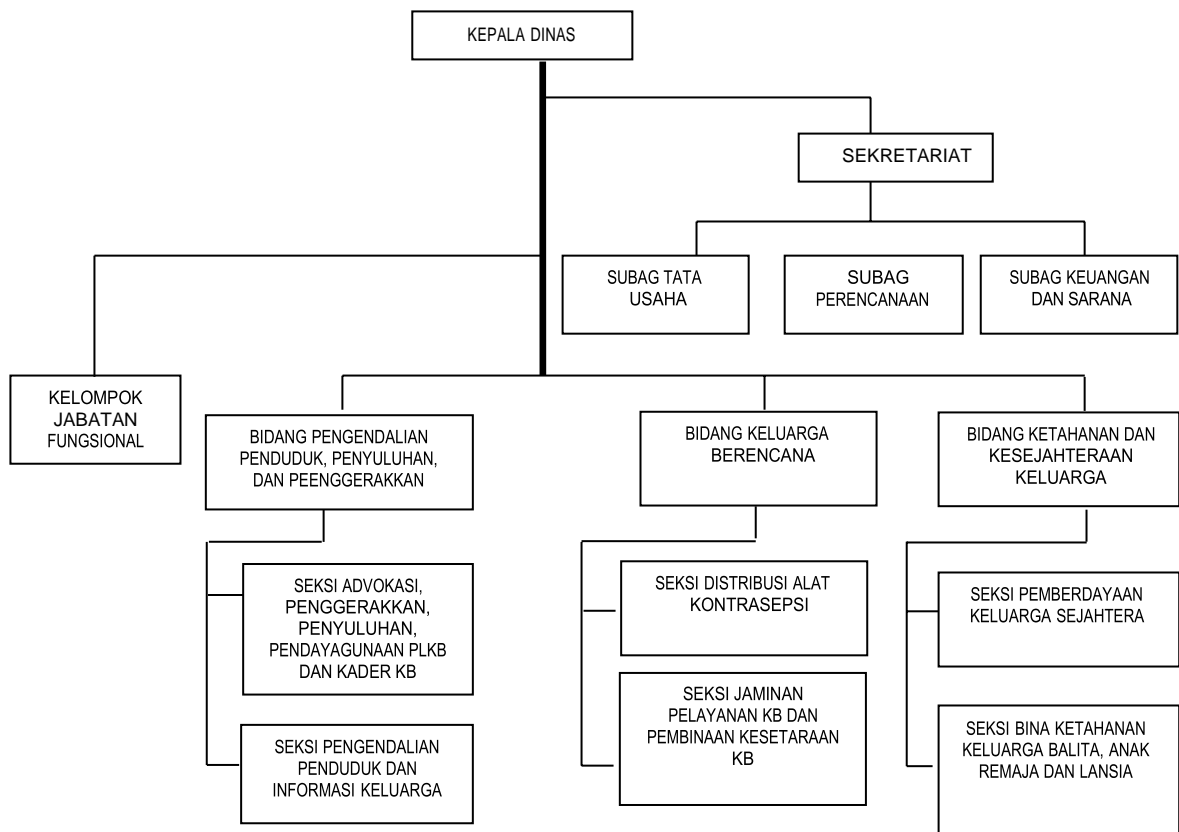
1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :
 - Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
2. Bidang Keluarga Berencana membawahi :
 - Seksi Distribusi Alat Kontrasepsi
 - Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesetaraan KB
3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
 - Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Remaja dan Lansia

d. Kelompok Jabatan Fungsional

- Penata Kependudukan dan keluarga Berencana

1.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas dibantu oleh Pejabat Struktural yang dapat dilihat pada bagan struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dibawah ini



1.4. ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan, faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal, faktor penghambat dan pendorong pelayanan kinerja OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka isu strategis yang diperhadapkan pada pelayanan kinerja antara lain ;

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas untuk Mengatasi Permasalahan Pelayanan KB
2. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
3. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga untuk menurunkan resiko kematian ibu melahirkan
4. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS
5. Penguatan Landasan Hukum dan Kelembagaan Kampung KB.

1.5. Permasalah Utama

1. Tingginya angka kelahiran atau TFR (Total Fertility Rate)
2. Angka pemakaian Kontrasepsi atau CPR (Contraceptive Prevalance Rate) yang masih di bawah standar nasional ;
3. Rendahnya Kesertaan MJKP
4. Tingginya Unmet Need
5. Rendahnya Partisipasi Keluarga Dalam Menghadapi Masalah Stanting
6. Kurangnya Edukasi yang Di terima Oleh Masyarakat

BAB II

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Maluku Tengah yang disusun ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Maluku Tengah dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam Renstra 2025-2030 dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah Telah Menetapkan tujuan organisasi Sebagai arah Strategi Menuju Perbaikan Kinerja selama 4 (Empat) tahun sesuai fungsi organisasi dengan menunjuk pada tujuan pembanguana kabupaten Maluku tengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yaitu : **“Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk”**.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 adalah indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2025

No.	Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Sasaran Strategis				
1.	Meningkatnya pengendalian penduduk menuju keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	$iBangga = \frac{Indeks\ Ketentraman + Indeks\ Kemandirian + Indeks\ Kebahagiaan}{3}$	SK Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN	Semua Bidang
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	$TFR = 5 \times \sum_{i=15-49} ASFR_i$	SK Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN	Bidang Keluarga Berencana
		Indeks Pembangunan Keluarga	$Indeks = \frac{Skor\ total - Skor\ Minimal}{Skor\ Maksimal - Skor\ Minimal} \times 100$	SK Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN	Semua Bidang

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja dengan sumber daya tertentu melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya berupa hasil maupun manfaat, maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk dalam suatu perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Tahun
1.	Meningkatnya pengendalian penduduk menuju keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	0
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,70
		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60,20

Sumber data : SK Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN

Untuk pencapaian indikator Kinerja diatas dilaksanakan melalui beberapa Program sebagai berikut :

A. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari 5 (Lima)

Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah Terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

2. Administrasi Keuangan perangkat daerah terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

b. Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Umum perangkat daerah terdiri dari 4 (Empat) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

b. Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang -undangan

4. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

B. Program Pengendalian Penduduk Terdiri dari satu Kegiatan yaitu :

a. Pemetaan perkiraan Pengendalian penduduk Cakupan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

C. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian

penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal terdiri dari 7 (Tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja
- b. Komunikasi informasi dan Edukasi KIE Program KKBPK sesuai kearifan local
- c. Penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program KKBPK
- d. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- e. Pengelolaan operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- f. Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok)
- g. Pengendalian program KKBPK

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3. Pengendalian pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (Empat) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengendalian pendistribusian Alat dan obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termaksud Jarinagn dan Jejaringnya
- b. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP
- c. Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di faskes kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
- d. Dukungan Operasional pelayanan KB Bergerak

4. Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam pelaksanaan Pelayaan dan Pembinaan Keertaan Ber-KB terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesrtaan Ber-KB
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB

D. Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari 1(Satu) Kegiatan yaitu :

- a. Pelaksanaan pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKL, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)
 2. Penyediaan Biaya operasional bago pengelola dan pelaksanan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah.

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator pencapaian sasaran :

$$\text{Pencapaian Sasaran} = \frac{\text{Realisasi Indikator Sasaran}}{\text{Target Indikator Sasaran}} \times 100\%$$

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 100 | = Amat Baik |
| 2. 80 - 100 | = Baik |
| 3. 50 – 79 | = Cukup |
| 4. < 50 | = Kurang |

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024 (Permenpan 53 Tahun 2014 Hal 22)

a. Indikator Tujuan

Capaian Kinerja Indikator Tujuan Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.1**Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025**

NO	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0	64,1	0

Sumber Data : SK Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN

b. Indikator Sasaran strategis

Indikator kinerja sasaran strategis Dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah merupakan indikator Kinerja utama. Capaian indikator Kinerja utama Berdasarkan indikator kinerja pada perjanjian kinerja Dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.2

Tabel 3.2**Target dan Realisasi Capaian kinerja Utama tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya pengendalian penduduk menuju keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0	64,1	0
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,70	2,29	84
		Indeks Pembangunan Keluarga	0	0	0

Sumber Data : SK Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN

Tambahkan narasi sesuai realisasi indicator tujuan tahun 2024

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah Pada tahun 2025 merupakan tahun kedua renstra periode 2025-2030. Perbandingan capaian Kinerja indikator Kinerja Tahun 2025 Dengan Capaian Indikator

pada tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		REALISASI 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA	REALISASI 2025	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan keluarga berkualitas	1,53	1,01	1.092	1,09	1,53	

Sumber Data : DPPKB Malteng
Tambahkan narasi

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi Capaian Kinerja Sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2025	
	Sasaran Strategis		Realisasi 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1.	Meningkatnya pengendalian penduduk menuju keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,1	0	64,1	0	64,1	0
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,29	2,79	2,29	2,75	2,29	2,75
		Indeks Pembangunan Keluarga	67,49	0	67,49	64,39	67,49	64,39

Sumber Data : DPPKB Malteng
Tambahkan narasi kenapa terjadi kenaikan dan penurunan

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan capaian Instansi lainnya

a. indikator tujuan

Perbandingan capaian indikator tujuan dengan instansi Daerah lainnya sebagaimana tabel 3.5 sebagai berikut

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi Capaian Kinerja Tujuan dibandingkan dengan instansi lainnya

No	Indikator Kinerja tujuan	Capaian Kinerja		
		Kab. Maluku Tengah	Kab. Buru	Kab. Maluku tenggara
1.	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan keluarga berkualitas	1,09	1,38	1,87

Sumber Data : DPPKB Malteng, Kab Buru dan Kab Maluku Tenggara
Tambahhi narasi kenapa terjadi kenaikan dan penurunan

b. Indikator Kinerja sasaran

Perbandingan capaian indikator sasaran instansi Daerah lainnya sebagaimana tabel 3.6 sebagai berikut

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi Capaian kinerja Sasaran dibandingkan dengan Instansi lainnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian kinerja		
		Kab. Maluku Tengah	Provinsi Maluku	Kota Ambon
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,1	67,1	72,9
2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,29	2,39	2,10
3	Indeks Pembangunan Keluarga	67,49		

Sumber Data : DPPKB Malteng,Prov Maluku dan Kota Ambon
Tambahhi narasi kenapa terjadi kenaikan dan penurunan

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

1. Indikator Tujuan

Laju Pertumbuhan Penduduk.

Penyebab peningkatan atau penurunan

Upaya yang dilakukan untuk pengatasi penurunan dan upaya yang diharapkan

2. Indikator kinerja sasaran Strategis/indikator tujuan Utama

a) Indikator presentasi Cakupan KB aktif

Penyebab peningkatan atau penurunan

Upaya yang dilakukan untuk pengatasi penurunan dan upaya yang diharapkan

Informasi Capaian indikator Peserta program Keluarga Berencana (KB) aktif hingga periode Juni 2024 mencapai 43.927 Pasangan Usia Subur (PUS). Hal itu berdasar pada data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon. Peserta KB aktif kita diatas standar Nasional CPR yakni mencapai 88, 24 persen dengan jumlah 43.927 PUS," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DPPKB) presentasi capaian peserta KB aktif sebesar 128,67 persen dari perkiraan permintaan masyarakat sebesar 34.947 pasangan. Sedangkan PUS baru yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 3.882 dari jumlah permintaan masyarakat 7.763, yakni mencapai 59,01 persen. pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dianggap mengkhawatirkan karena tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Program KB hadir untuk menjawab setiap persoalan terkait kependudukan, dimana KB merupakan bagian terpadu dalam program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang baik dari segi kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya.

Capaian indikator Presentasi cakupan KB aktif tahun 2021 sebesar 1,334% atau belum mencapai target atau target yang ditetapkan 90 %, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 85 % maka realisasi indikator kinerja presentasi KB aktif mengalami penurunan. secara kualitas program KB belum dikatakan sukses, karena mayoritas masyarakat masih memilih menggunakan KB jangka pendek seperti suntik, kondom, dan PIL.

Disisi lain, pemerintah menganjurkan masyarakat menggunakan KB jangka panjang seperti IUD, Implant, MOW dan MOP.

Alat kontrasepsi ini dianggap lebih efektif untuk menunda kehamilan hingga jangka waktu tiga tahun lebih. Metode KB jangka panjang yakni MKJP dinilai lebih aman karena minim sekali efek samping.

Program KB harus dilakukan agar bisa menurunkan angka kelahiran sehingga penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan dalam menjamin kesejahteraan keluarga,

b)Menurunnya Angka Kelahiran (TFR)

Penyebab peningkatan atau penurunan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penurunan dan upaya yang diharapkan

Menurunnya angka kelahiran total/total fertility rate (TFR) menjadi 2,45 di tahun 2024; Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern/modern contraceptive prevalence rate (mCPR) sebesar 36,3 persen pada tahun 2024; Menurunnya angka kelahiran remaja usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun) menjadi 21,1 di tahun 2023 dan Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet need menjadi 24 pada tahun 2024.

Stunting masih diangka 24,4 persen sesuai SSGI dan untuk Maluku sebesar 28

persen, sementara target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14 persen.

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program spesifik dalam upaya menurunkan angka stunting, pun demikian untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Capaian data-data tersebut menggambarkan bahwa masih perlu upaya kerja keras atau kerja ekstra ordinary, untuk mencapai hasil sesuai yang ditargetkan dan pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan stunting dan menurunkan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Maluku.

Dikatakan, upaya kerja keras yang mesti dilakukan antara lain melalui Peningkatan kesertaan KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang beresiko stunting, melalui koordinasi intensifikasi pelayanan KB di Fasilitas kesehatan (Faskes).

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam pelaporan kinerja adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi dilakukan berkaitan dengan sejauh mana organisasi telah mencapai tingkat produktifitas optimala atas dasar sumber daya yang telah digunakan/dimanfaatkan. Tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2024 Sebagai berikut :

Tabel 3.8

Efisiensi penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	1	2	3	4	(3/4)*100
1.	Meningkatnya pengendalian penduduk menuju keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0,39	91	98,9
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		0.61	89	3,09	
Indeks Pembangunan Keluarga					

Sumber Data : DPPKB Malteng

Dari sudut pandang efektifitas, maka pencapaian kinerja sasaran Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana terhadap penggunaan Sumber daya dapat dikategorikan berhasil.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

capaian pernyataan kinerja

Petakkan nama program yang menjawab sasaran strategis Bersama indikator program dan nilai uang serta realisasinya tahun berkenaan

3.2. REALISASI ANGGARAN

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Dari penilaian berdasarkan cara diatas, maka dapat disampaikan bahwa semua sasaran terhadap realisasi program dan kegiatan meningkat dengan Target Anggaran Rp. 10.233.820.390,- atau sekitar 91 % sehingga dapat dikatakan hampir seluruh program / kegiatan dapat terealisasi dengan baik.

Dari 4 (empat) program yang ada, capaian tertinggi adalah pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Kineja dan Keuangan dan Program Pengembangan Data/Informasi yaitu 100%.

Secara lengkap kinerja dari program padaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah dan presentase pencapaian program dan kegiatan DPPKB Kabupaten Maluku Tengah secara jelas dapat dilihat tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel.3.7

Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian penduduk dan KB Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
		Rp	%	
Program : Penunjang Urusan Pemerintah	2.569.661.595	2.348.440.137	99	101.191.034
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.255.989.595	2.169.360.658	99	86.628.937
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.255.989.595	2.169.360.658	99	86.628.937
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.387.040	163.086.500	99	2.300.540
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.953.500	11.953.500	100	0
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	7.734.500	7.734.500	100	0
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	1.200.000	40	2.300.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.199.040	142.198.500	99	540
Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.534.960	76.008.188	98	6.526.772
Penyedia Jasa Kamunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	15.241.000	12.314.228	98	2.926.772
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.293.960	63.693.960	98	3.600.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.750.000	60.015.215	98	5.734.785
Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	65.750.000	60.015.215	98	5.734.785
PROGRAM : PENGENDALIAN PENDUDUK	377.876.000	358.216.000	99	19.651.000
Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	377.876.000	358.216.000	99	19.651.000
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	90.476.000	81.772.000	96	8.704.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	59.455.000	99	545.000
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	56.400.000	56.400.000	100	0
Pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	171.000.000	160.589.000	98	10.411.000
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.929.034.000	1.836.412.000	98	92.622.000
Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.929.034.000	1.836.412.000	98	92.622.000
Pengendalian Program KKBPK	91.550.000	84.070.000	98	7.480.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	954.000.000	938.298.000	98	15.702.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	360.000.000	360.000.000	100	0
Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	274.134.000	273.020.000	99	1.114.000
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	249.350.000	181.024.000	90	68.326.000
Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	1.358.320.795	1.358.275.795	99	45.000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.033.500.000	1.033.500.000	100	0
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	324.820.795	324.775.795	99	45.000
Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kda T YYYYY	1.050.896.000	1.005.391.000	98	45.505.000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	42.300.000	35.250.000	95	7.050.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	924.546.000	890.486.000	95	34.060.000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34.650.000	33.375.000	99	1.275.000
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	49.400.000	46.280.000	98	3.120.000
Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.165.032.000	1.163.982.000	100	1.050.000

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
		Rp	%	
Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	74.832.000	73.782.000	99	1.050.000
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	715.000.000	715.000.000	100	0
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	375.200.000	375.200.000	100	0
PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.783.000.000	1.780.650.000	100	2.350.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	139.600.000	137.250.000	100	2.350.000
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.600.000	9.600.000	100	0
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Kelurga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Kelurga/UPPKS)	130.000.000	127.650.000	99	2.350.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.643.400.000	1.643.400.000	100	0
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.643.400.000	1.643.400.000	100	0

Sumber Data: Dppkb Malteng

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari apa yang telah disajikan dan uraikan pada bab sebelumnya dapat kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik, terlepas dari berbagai semua kesulitan dan hambatan yang ada, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah membukukan kinerja kuantitatif dari 1 sasaran dengan total kegiatan sebanyak 4 Program dan 10 kegiatan, maka capaian kinerja ditetapkan sebesar 91, % dengan predikat Baik. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah adalah 89%. Namun secara keseluruhan kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah sudah bias dikatakan Baik.

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Maluku Tengah, dengan sumber dan dari APBD yang merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus di wujudkan setiap tahunnya.

Masohi, Maret 2025

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Maluku Tengah



ABDUL LATIEF KEY, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19680916 198903 1 014

